



ANALISIS GINI RATIO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA 2022



TIM PENYUSUN



Pengarah :

Ig. Trihastono, S.Sos., M.M.

Penanggungjawab :

Joko Marwiyanto, S.Kom., M.Eng.

Penyunting :

Elvade Ristiono, S.I.P.

Penulis Naskah :


Desy Ratnaningrum, S.Si.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Publikasi Analisis Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2021. Harapannya publikasi ini dapat memberikan informasi mengenai distribusi pendapatan dan tingkat pemerataan pendapatan yang diterima masyarakat sebagai akibat semakin meningkatnya aktivitas pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi dan dapat memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan di Kota Yogyakarta.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam perbitan publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi selanjutnya.

Yogyakarta, Desember 2022
**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kota Yogyakarta**

IGNATIUS TRIHASTONO, S.Sos., M.M.
NIP. 19690723 199603 1 005

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
PENDAHULUAN.....	8
I. LATAR BELAKANG.....	8
II. TUJUAN	10
III. SUMBER DATA	10
IV. SISTEMATIKA PENULISAN	10
TINJAUAN PUSTAKA	13
I. PEMBANGUNAN EKONOMI	13
II. UKURAN TINGKAT KESENJANGAN MENGGUNAKAN INDEKS GINI.....	15
III. UKURAN TINGKAT KESENJANGAN MENGGUNAKAN KURVA LORENZ.....	17
PEMBAHASAN	20
I. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	20
II. POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA.....	24
III. PERTUMBUHAN EKONOMI.....	27
IV. INFLASI	29
V. KEMISKINAN.....	30
VI. GINI RATIO	31
KESIMPULAN	34
DAFTAR PUSTAKA.....	37



DAFTAR TABEL



TABEL 3. 1	
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEMANTREN DAN JENIS KELAMIN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.....	20
TABEL 3. 2	
PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.....	22
TABEL 3. 3	
PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.....	23
TABEL 3. 4	
PERSENTASE PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS (RUPIAH) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.....	24
TABEL 3. 5	
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.....	26
TABEL 3. 6	
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN, INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN, DAN GARIS KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021.....	31
TABEL 3. 7	
GINI RATIO DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021.....	32

DAFTAR GAMBAR



GAMBAR 2.1	
PENGUKURAN RATIO GINI DENGAN KURVA LORENZ	18
GAMBAR 3.1	
PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021	28
GAMBAR 3.2	
PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021	30



PENDAHULUAN





I. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan sasaran utama bagi setiap daerah yang sedang berkembang. Masing-masing sektor atau subsektor ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah selama suatu periode tertentu. Selain sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000:55). Pembangunan ekonomi selalu memunculkan polemik terkait penentuan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Tingginya ekonomi suatu

daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi unggul dalam pembangunan ekonomi (Prayitno, 1986).

Kesenjangan perekonomian antar daerah masih dapat ditoleransi sejauh tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak menciptakan ketidakmerataan pendapatan yang luar biasa dalam masyarakat. Hal itu merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh para pengambil kebijakan. Negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia hingga saat ini masih menghadapi persoalan kompleks terkait dengan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Persoalan ketimpangan pendapatan atau lebih populer disebut kesenjangan ini dalam skala yang lebih kecil juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/ kota. Masalah ketimpangan antar individu, antar kelompok, antar sektor maupun antar daerah perlu mendapat penanganan segera karena akan berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.

II. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Penyusunan publikasi ini dibatasi pada ukuran kuantitatif besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh penduduk menggunakan ukuran *Gini Ratio*.

III. Sumber Data

Analisa *Gini Ratio* menggunakan data sekunder dari BPS Kota Yogyakarta. Analisa pada publikasi ini dibatasi pada ukuran tingkat kesenjangan menggunakan Indeks Gini.

IV. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan publikasi Analisis *Gini Ratio* Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penulisan

2. Tinjauan Pustaka

- A. Pembangunan Ekonomi
- B. Ukuran Tingkat Kesenjangan Menggunakan Indeks Gini
- C. Ukuran Tingkat Kesenjangan Menggunakan Kurva Lorenz

3. Pembahasan

- A. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- B. Pola Konsumsi Rumah Tangga
- C. Pertumbuhan Ekonomi
- D. Inflasi
- E. Kemiskinan
- F. *Gini Ratio*

4. Kesimpulan



TINJAUAN PUSTAKA





I. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan proses dari berbagai dimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap, mental dan kelembagaan, termasuk pula laju perubahan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan mengatasi kemiskinan (Todaro, 2000). Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai kenaikan pendapatan riil negara akan tetapi juga berbicara

mengenai perbaikan sistem kelembagaan dan tatanan sosial yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Menurut Todaro (2004) ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara

lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

II. Ukuran Tingkat Kesenjangan Menggunakan Indeks Gini

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka *Gini Ratio* yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/*Gini Ratio* merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan Kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana Kurva Lorenz tersebut berada (Lincoln Arsyad, 2010). Secara teknis, langkah awal yaitu penduduk diurutkan dari yang mempunyai pengeluaran perkapita perbulan paling rendah sampai dengan yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan paling tinggi. Kemudian dibuat kelas-kelas setiap 10 persen dari paling rendah sampai paling tinggi. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi persentase dan kumulatif persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun

pendapatan yang diterima. Berikut formula untuk mencari indeks Gini:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{fp_i(fc_i + c_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan:

- GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)
- fp_i = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke(i-1)
- k = jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Nilai dari indeks Gini terletak antara 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Semakin tinggi nilai indeks Gini atau mendekati satu menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai Gini menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

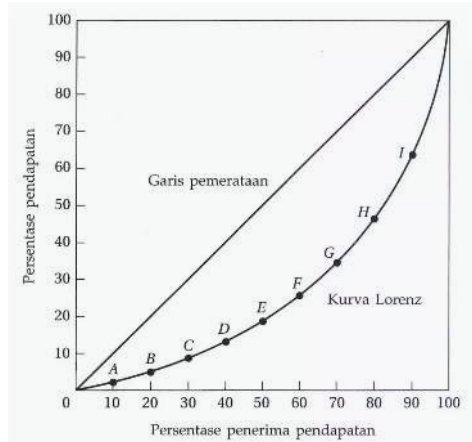
Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi sebagai berikut:

1. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,3$
2. Ketimpangan taraf sedang/moderat, bila G antara $0,3 - 0,5$
3. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

III. Ukuran Tingkat Kesenjangan Menggunakan Kurva Lorenz

Tingkat ketimpangan juga dapat diukur juga melalui *personal income* menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz ditemukan oleh seorang ahli statistik asal Amerika bernama Conrad Lorenz. Kurva ini tergambar dalam sebuah bujur sangkar dimana sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan (Dumairy, 1996). Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya terletak pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata.

Gambar 2.1 Pengukuran Ratio Gini dengan Kurva Lorenz



Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk, titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut merupakan garis “pemerataan sempurna” (*perfect equality*). Sebaliknya, jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.



PEMBAHASAN





I. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 tercatat sebanyak 415.509 jiwa dengan 48,75 persen penduduk laki-laki dan 51,25 persen penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kemantren Umbulharjo sebanyak 71.012 jiwa dengan persentase penduduk laki-laki sebanyak 8,36 persen dan 8,73 persen penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berada di Kemantren Pakualaman yaitu sebesar 10.657 jiwa dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 1,23 persen dan 1,33 persen penduduk perempuan.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2021

Kemantren	Laki-laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Tegalrejo	18.279	4,40	19.112	4,60	37.391
Jetis	13.245	3,19	14.041	3,38	27.286
Gondokusuman	20.835	5,01	22.344	5,38	43.179

Kemantren	Laki-laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Danurejan	10.454	2,52	10.929	2,63	21.383
Gedongtengen	9.652	2,32	10.031	2,41	19.683
Ngampilan	8.930	2,15	9.355	2,25	18.285
Wirobrajan	13.693	3,30	14.264	3,43	27.957
Mantrijeron	17.248	4,15	18.221	4,39	35.469
Kraton	10.598	2,55	11.157	2,69	21.755
Gondomanan	7.252	1,75	7.617	1,83	14.869
Pakualaman	5.124	1,23	5.533	1,33	10.657
Mergangsan	15.431	3,71	16.444	3,96	31.875
Umbulharjo	34.743	8,36	36.269	8,73	71.012
Kotagede	17.091	4,11	17.617	4,24	34.708
Kota Yogyakarta	202.575	48,75	212.934	51,25	415.509

Sumber : Data konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2021

Penyerapan tenaga kerja tahun 2021 paling tinggi terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 28,09 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja paling rendah terjadi pada sektor *real estate* yaitu sebesar 0,09 persen. Hal ini disebabkan salah satunya karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatas-

an kegiatan dan berkurangnya pengguna *real estate* seperti hotel yang memengaruhi pendapatan sehingga berakibat adanya pengurangan jumlah karyawan.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59
Pertambangan dan Penggalian	0,17
Industri Pengolahan	14,53
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,23
Konstruksi	3,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,09
Transportasi dan Pergudangan	7,15
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	16,51
Informasi dan Komunikasi	2,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,96
Real estate	0,09
Jasa Perusahaan	2,74
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,55

Lapangan Pekerjaan Utama	2021
Jasa Pendidikan	6,43
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97
Jasa Lainnya	10,48
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Penduduk Kota Yogyakarta yang bekerja pada tahun 2021 didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMK dan SMA dengan capaian masing-masing sebesar 25,58 persen dan 21,92 persen. Persentase tertinggi selanjutnya yaitu penduduk dengan pendidikan tertinggi tingkat Sarjana Muda/Doktor/Ph.D yaitu sebesar 17,91 persen. Sedangkan persentase terendah yaitu penduduk bekerja yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,11 persen.

Tabel 3. 3 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2021
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,11
Tidak/Belum Tamat SD	4,97
Sekolah Dasar	9,72
SMP	13,70
SMA	21,92

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2021
SMK	25,58
Diploma I/II/III/Sarjana Muda	6,08
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	17,91
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

II. Pola Konsumsi Rumah Tangga

Gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diamati dari indikator pola konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pendapatan untuk pengeluaran makanan akan bergeser ke pengeluaran bukan makanan. Artinya, semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka persentase konsumsi untuk makanan akan semakin kecil, sedangkan persentase konsumsi bukan makanan akan semakin besar.

Tabel 3. 4 Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Kelompok Komoditas	2021
Makanan	
Padi-padian	2,64
Umbi-umbian	0,35

Kelompok Komoditas	2021
Ikan/udang/cumi/kerang	1,61
Daging	1,99
Telur dan susu	2,2
Sayur-sayuran	2,62
Kacang-kacangan	0,75
Buah-buahan	1,87
Minyak dan kelapa	0,63
Bahan minuman	0,97
Bumbu-bumbuan	0,54
Konsumsi lainnya	0,65
Makanan dan minuman jadi	17,02
Rokok	2,43
Jumlah makanan	36,27
Bukan Makanan	
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	29,08
Aneka komoditas dan jasa	21,95
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,11
Komoditas tahan lama	5,08
Pajak, pungutan, dan asuransi	4,95

Kelompok Komoditas	2021
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	0,56
Jumlah bukan makanan	63,73

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Persentase pengeluaran per kapita per bulan lebih banyak pada komoditas bukan makanan yaitu sebesar 63,73 persen dibandingkan komoditas makanan yaitu sebesar 36,27 persen. Persentase pengeluaran terbesar pada komoditas bukan makanan yaitu pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 29,08 persen. Sedangkan persentase pengeluaran terbesar pada komoditas makanan yaitu pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi sebesar 17,02 persen.

Tabel 3. 5 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Golongan Pengeluaran	2021
<150.000	0
150.000-199.999	0
200.000-299.999	1,67
300.000-499.999	16,63
500.000-749.999	11,32
750.000-999.999	11,45
1.000.000-1.499.999	20,02

Golongan Pengeluaran	2021
>1.500.000	38,91
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Dilihat berdasarkan golongan pengeluaran per kapita, persentase penduduk Kota Yogyakarta didominasi golongan pengeluaran lebih dari Rp 1.500.000 per bulan yaitu sebesar 38,91 persen. Sedangkan persentase terkecil yaitu penduduk dengan rentang pengeluaran Rp 200.000 hingga Rp 299.000 sebesar 1,67 persen.

Pergeseran pola konsumsi penduduk akan sejalan dengan besarnya pengeluaran. Semakin tinggi golongan pengeluarannya, maka pola konsumsinya akan semakin mengalami pergeseran, yaitu dari yang semula lebih banyak konsumsi makanan, bergeser menjadi lebih dominan ke konsumsi non makanan. Kelompok pengeluaran menengah ke atas cenderung menjadi lebih *value-conscious* karena mereka lebih memperhatikan kenyamanan, kesehatan, dan kebutuhan gaya hidup.

III. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi

dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu mencapai -2,42 persen. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 5,09 persen.

Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Diolah

IV. Inflasi

Tingkat pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, yang biasa dikenal sebagai inflasi. Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang kondusif akan menjaga daya beli masyarakat sehingga laju inflasi terkendali dengan baik. Ketersediaan barang dan jasa di suatu wilayah akan mempengaruhi perubahan harga disamping karakteristik pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Kinerja perekonomian secara makro membaik apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah menguat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, inflasi Kota Yogyakarta sebesar 4,20 persen kemudian pada tahun 2018 inflasi sebesar 2,66 persen menurun 1,64 persen dari tahun 2017. Meskipun di tahun 2019 laju inflasi sempat naik yaitu 2,77 persen, namun pada tahun 2020 laju inflasinya menurun menjadi di bawah 2 persen yaitu sebesar 1,4 persen. Pada tahun 2021, inflasi di Kota Yogyakarta kembali meningkat di atas 2 persen yaitu sebesar 2,29 persen.

Gambar 3.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021



Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Diolah

V. Kemiskinan

Pada periode 2017–2019, persentase penduduk miskin cenderung menurun. Pada situasi pademi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 mengakibatkan persentase penduduk miskin kembali meningkat dengan capaian sebesar 7,27 persen dan 7,69 persen. Begitu pula dengan indek kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2017–2019 cenderung menurun, namun pada tahun 2020 kembali meningkat sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang tidak signifikan. Artinya bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin cenderung masih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69
Indeks kedalaman kemiskinan	1,58	1,38	0,85	1,19	1,07
Indeks keparahan kemiskinan	0,48	0,34	0,2	0,28	0,21
Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	423.815	467.061	495.562	533.423	556.674

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

VI. Gini Ratio

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan adalah *Gini Ratio*. Pada tahun 2017, angka *Gini Ratio* sebesar 0,446. Pada tahun 2018 hingga 2019, angka *Gini Ratio* mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,419 dan 0,371. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 angka *Gini Ratio* kembali meningkat menjadi 0,421 dan 0,464. Angka *Gini Ratio* di Kota Yogyakarta periode 2017–2021 menunjukkan nilai diatas 0,3. Artinya, wilayah Kota Yogyakarta memiliki ketimpangan pendapatan yang termasuk dalam kriteria moderat.

Tabel 3.7 *Gini Ratio* di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Gini Ratio</i>	0,446	0,420	0,371	0,421	0,464
Kriteria	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

World Bank (2016) memaparkan penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi di Indonesia antara lain adanya ketimpangan kesempatan, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi yang rendah. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan akses sumber daya bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong terciptanya kondisi di mana masyarakat dengan ekonomi yang rendah akan kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 memiliki peran yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian khususnya di Kota Yogyakarta.



KESIMPULAN



KESIMPULAN



Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Lebih dari 25 persen penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
2. Dari sisi pendidikan, penduduk Kota Yogyakarta yang bekerja, hampir 50 persen di dominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan tertinggi SMA dan SMK.
3. Pengeluaran penduduk Kota Yogyakarta didominasi pada pengeluaran bukan makanan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang semakin tinggi.
4. Sebanyak 38,91 persen penduduk Kota Yogyakarta masuk dalam golongan pengeluaran lebih dari Rp 1.500.000 per bulan. Hal ini selaras dengan pengeluaran penduduk Kota Yogyakarta dimana pola konsumsinya lebih dominan ke konsumsi non makanan.

5. Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan 7,51 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 5,09 persen.
6. Inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 meningkat 0,89 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian 2,29 persen.
7. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada persentase penduduk miskin yang kembali meningkat dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 7,69 persen.
8. Pada tahun 2021, angka gini rasio meningkat 0,043 dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 0,464.



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA



- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2021. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2022. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022*. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2017. *Analisis Ketimpangan Pengeluaran Penduduk (Indeks Gini) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2016*. Yogyakarta
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2019. *Ratio Gini Kota Yogyakarta 2018*. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development. Seventh Edition*. New York University, Addison Mesley.
2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- Todaro dan Smith (2011) Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. rev. ed. Jakarta: Penerbit Erlangga.



ANALISIS GINI RATIO

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165

 kominfo.jogjakota.go.id

 (0274) 551230, 561270

 08122780001

 kominfosandi@jogjakota.go.id

 upik@jogjakota.go.id